

Wali Kota Ramlan Nurmatias Tegaskan Komitmen Pemko Bukittinggi Jamin Kesehatan Warga melalui UHC

Linda Sari - BUKITTINGGI.TELISIKFAKTA.COM

Dec 30, 2025 - 19:44



Wali Kota Ramlan Nurmatias Tegaskan Komitmen Pemko Bukittinggi Jamin Kesehatan Warga melalui UHC

Jakarta — Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menegaskan posisinya sebagai daerah yang konsisten menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. Untuk ketiga kalinya, Pemko Bukittinggi berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2026, sebuah penghargaan nasional yang

diberikan kepada pemerintah daerah dengan komitmen tinggi dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Dr. (Hc) Drs. A. Muhamimin Iskandar, kepada Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, pada acara penganugerahan UHC Award yang berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Januari 2026.

UHC AWARD 2026 KEMBALI DIRAIH, PEMKO BUKITTINGGI KOMIT BERIKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT



Kota Bukittinggi berhasil meraih **kategori Pratama** dengan capaian **cakupan kepesertaan JKN sebesar 98%** dan tingkat keaktifan peserta mencapai 80%, berkat dukungan pembiayaan dari anggaran daerah. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh **Мenteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Dr. (Hc) Drs. A. Muhamimin Iskandar** di Ballroom JIEXPO Kemayoran.

Capaian ini sekaligus menandai keberhasilan Pemko Bukittinggi mempertahankan status UHC secara berkelanjutan, setelah sebelumnya juga meraih penghargaan serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Konsistensi ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan kesehatan di Kota Bukittinggi tidak bersifat sesaat, melainkan dirancang sebagai program jangka panjang yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Bukittinggi Raih Kategori Pratama

Pada tahun 2026, UHC Award diberikan kepada 31 provinsi serta 397 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kota Bukittinggi berhasil meraih kategori Pratama dengan capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 98 persen dan tingkat keaktifan peserta mencapai 80 persen.

Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi. Melalui alokasi anggaran yang memadai, Pemko Bukittinggi memastikan masyarakat tetap memperoleh jaminan kesehatan, khususnya bagi warga yang belum terlindungi oleh skema pembiayaan lainnya.

Keberhasilan ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola data kepesertaan JKN secara akurat dan berkelanjutan, sehingga program UHC dapat tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.



UHC Cerminan Kehadiran Negara

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhammin Iskandar, dalam sambutannya menegaskan bahwa Universal Health Coverage merupakan kondisi ideal ketika seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dan memiliki tingkat keaktifan yang baik.

Menurutnya, UHC menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara hadir untuk menjamin hak dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

“Universal Health Coverage adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Daerah yang berhasil mencapai UHC menunjukkan bahwa pemerintahannya berjalan dengan orientasi pelayanan publik yang kuat,” ungkap Muhammin Iskandar.

Ia juga mendorong pemerintah daerah agar tidak berhenti pada capaian administratif semata, tetapi terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

“Ke depan, daerah yang masih berstatus madya harus meningkatkan capaian menjadi utama. Sementara daerah yang sudah berstatus utama, harus fokus pada peningkatan mutu dan kualitas layanan kesehatannya,” tegasnya.

Komitmen Wali Kota Bukittinggi

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan rasa syukur atas kembali diraihnya UHC Award Tahun 2026. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta dukungan masyarakat Kota Bukittinggi.

“Alhamdulillah, Kota Bukittinggi kembali menerima UHC Award. Ini adalah penghargaan yang sangat berarti bagi kami, karena mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan,” ujar Ramlan Nurmatias.

Menurutnya, Pemko Bukittinggi menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah, seiring dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

“Bagi kami, kesehatan bukan sekadar program, tetapi merupakan investasi jangka panjang. Masyarakat yang sehat akan mampu berkontribusi lebih baik dalam pembangunan daerah,” lanjutnya.

Akses Cepat Tanpa Masa Tunggu

Wali Kota Ramlan Nurmatias menjelaskan, melalui program UHC, masyarakat Kota Bukittinggi yang benar-benar membutuhkan dapat langsung memperoleh jaminan kesehatan tanpa harus menunggu masa tunggu selama 14 hari.

“Bagi warga Kota Bukittinggi yang membutuhkan, kepesertaan UHC diberikan secara prioritas. Masyarakat yang didaftarkan dapat langsung aktif dan segera memperoleh pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun di rumah sakit,”

jelasnya.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan tidak ada warga yang tertunda mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena kendala administratif atau finansial.

“Prinsipnya, tidak boleh ada warga Bukittinggi yang sakit lalu tidak bisa berobat karena alasan biaya. Pemerintah harus hadir dan memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses oleh semua,” tegas Ramlan.

Dukungan Anggaran Rp12,5 Miliar

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjamin keberlanjutan program UHC, Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,5 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kepesertaan JKN bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu dan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan kesehatan dari pemerintah daerah.

“Anggaran ini kita siapkan agar program UHC dapat berjalan berkelanjutan. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat,” kata Ramlan Nurmatias.

Ia menambahkan, pengelolaan anggaran UHC dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan perangkat daerah terkait agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Sinergi OPD dan Tenaga Kesehatan

Keberhasilan Kota Bukittinggi dalam meraih UHC Award juga tidak terlepas dari sinergi lintas perangkat daerah, khususnya Dinas Kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, serta dukungan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Ramli, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi fasilitas, sumber daya manusia, maupun sistem pelayanan.

Program promotif dan preventif juga terus digencarkan, sejalan dengan upaya menekan angka kesakitan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.

Menuju Pelayanan Kesehatan Berkualitas

Dengan kembali diraihnya UHC Award Tahun 2026, Pemko Bukittinggi berkomitmen untuk tidak hanya mempertahankan capaian yang ada, tetapi juga terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan di masa mendatang.

Wali Kota Ramlan Nurmatias menegaskan bahwa ke depan, fokus pembangunan kesehatan tidak hanya pada aspek pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, agar

masyarakat tidak hanya terlindungi secara administrasi, tetapi juga benar-benar merasakan layanan yang berkualitas, manusiawi, dan berkeadilan,” tutupnya.

Melalui komitmen tersebut, Pemko Bukittinggi berharap dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (*Lindafang*)